

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Malala Yousafzai merupakan seorang anak perempuan berkewarganegaraan Pakistan yang lahir dari keluarga sederhana pada tanggal 12 Juli 1997. Malala tumbuh besar di kota kecil di bagian barat laut Pakistan, Mingora, Swat. Malala dan keluarganya berasal dari suku Pashtun, dan seperti mayoritas orang di Pakistan mereka menganut Islam Sunni. Ayah Malala yaitu Ziauddin Yousafzai merupakan pendiri sekolah swasta untuk laki-laki dan perempuan di Mingora bernama "Sekolah Khushal" dan merupakan seorang aktivis HAM. Malala dibesarkan di lingkungan sekolah yang didirikan oleh ayahnya, sehingga sejak kecil Malala sudah tertarik pada pendidikan dan senang membaca buku. Meskipun tumbuh besar di lingkungan sekolah dan dididik oleh seorang ayah yang berpendidikan, ibu Malala hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bahkan tidak dapat menulis dan membaca.

Sejak kecil Malala senang mendengarkan dan menyaksikan ayahnya berbicara di depan umum mengenai HAM, pendidikan, politik, dan agama, sehingga ketika berusia sebelas tahun Malala sudah tertarik dengan hal-hal tersebut dan mulai sering berbicara di depan umum mengenai HAM dan pendidikan. Oleh sebab itu, Malala memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah Pakistan dan beberapa kali

diwawancarai oleh media setempat seperti koran, radio maupun televisi karena prestasinya sebagai aktivis muda di Pakistan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Pakistan dapat dikatakan masih tergolong buruk. Hal ini dikarenakan masalah-masalah ekonomi yang dialami Pakistan mulai dari korupsi hingga hutang luar negeri, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi Pakistan berada dalam tingkat pertumbuhan terendah di wilayah tersebut. Selain ekonomi, bias gender juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh penduduk di Pakistan. Sebagai negara Islam yang menganut budaya patriarki, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua setelah kaum laki-laki sehingga tidak berhak memilih kebebasan untuk dirinya sendiri tanpa seizin kaum laki-laki.

Kondisi kehidupan masyarakat di Pakistan terutama di wilayah Swat, semakin memburuk ketika kelompok Taliban datang dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Kelompok Taliban yang dipimpin oleh Mulana Fazlullah mula-mula bersikap ramah untuk menarik simpati penduduk sekitar. Hingga akhirnya mendirikan radio ilegal bernama Mullah FM yang dijadikan sebagai propaganda Taliban untuk mempengaruhi penduduk disana. Fazlullah memperkenalkan diri sebagai pembaru Islam dan penafsir Al-Quran, kemudian mendorong penduduk Swat agar menerapkan syariat-syariat Islam yang menurutnya hampir hilang termakan zaman.

Penduduk Swat mula-mula menyukai perkataan Fazlullah tentang penerapan hukum Islam, karena orang-orang merasa frustrasi dengan sistem peradilan Pakistan

yang menggantikan sistem peradilan masyarakat di Lembah Swat sejak wilayah tersebut melebur ke Pakistan (Yousafzai dan Lam, 2014: 133). Demikian juga dikarenakan pemerintahan yang seringkali hanya mengumbar janji dan korupsi yang semakin menjadi, menambah faktor mudahnya ajaran-ajaran Taliban diterima. Tetapi ketika Taliban mulai menunjukkan karakter aslinya, penduduk Swat mulai mengalami ketakutan yang sangat besar. Orang-orang kaya memilih untuk keluar dari Swat dan menetap di daerah yang lebih aman, sedangkan yang tak punya uang cukup terpaksa tinggal dan pasrah menjadi korban kebrutalan kelompok Taliban.

Taliban mengeluarkan berbagai larangan dengan alasan tidak sesuai dengan hukum Islam. Larangan-larangan tersebut ialah seperti dilarang memutar dan mendengarkan musik, dilarang bernyanyi dan menari, dilarang menonton televisi, anak perempuan dinyatakan haram untuk sekolah, perempuan dewasa dilarang keluar rumah tanpa didampingi mahram dan harus memakai *burqah*, laki-laki dewasa harus memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Bagi siapa pun yang melanggar akan dihukum cambuk atau bahkan hingga dieksekusi mati.

Anak-anak perempuan yang takut akan ancaman dari Taliban, akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah sesuai perintah Taliban. Selain itu, sekolah-sekolah yang tetap menyekolahkan anak-anak perempuan satu persatu mulai diledakkan oleh Taliban.

Malala sangat prihatin terhadap apa yang terjadi di negaranya, sebab sebelum Taliban datang pun kondisi pendidikan di negaranya sudah cukup buruk, dan semakin diperburuk oleh kelompok Taliban. Malala yang sudah sering berbicara tentang

pendidikan dan HAM, melihat kondisi ini semakin gencar berbicara menyuarakan hak-haknya dan hak-hak anak perempuan. Banyak media yang ingin mewawancarai anak perempuan untuk mengetahui kondisi perempuan dan pendidikan di Pakistan, tetapi tidak seorang anak pun yang berani menyuarakan suaranya. Malala dalam bukunya (*I am Malala*) menuliskan :

"Media perlu wawancara. Mereka ingin mewawancarai seorang anak perempuan kecil, tapi semua anak perempuan ketakutan. Dan, seandainya pun tidak, orang tua mereka tidak akan mengizinkan. Aku punya ayah yang tidak merasa takut, yang berdiri di sampingku. Dan berkata bahwa aku seorang anak dan aku berhak bicara." (Yousafzai dan Lamb, 2014: 166)

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah: Bagaimana langkah-langkah Malala Yousafzai memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan?

III. Kerangka Teori

Teori Advokasi

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut (Azizah 2013, 11). Advokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *to advocate* yang berarti "membela" (pembelaan kasus di pengadilan –

to defend), “memajukan” atau mengemukakan” (*to promote*), berusaha “menciptakan yang baru atau yang belum pernah ada (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan “perubahan” secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Menurut *Webster’s New Collegiate Dictionary* (INDONESIA n.d., 4), mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Jadi tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. Menurut Laswell, proses kebijakan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu, *agenda setting, polic formulation and legitimation, implementation*, dan *evaluation* (*The stages model of the policy process*). Advokasi adalah proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktifitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi kebijakan dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang di berlakukan oleh pemerintah (Azizah 2013, 11).

Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*) (INDONESIA n.d., 4).

Tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa, bukan semata-mata membuat orang sekedar tahu tetapi juga mau terlibat dan bertindak. Advokasi bukan sekedar mengubah kognisi

(pengetahuan, wawasan) seseorang, tetapi juga mempengaruhi afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) orang banyak. Jadi, kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis (Azizah, 2013: 15).

- *Transnational Advocacy Networks (TANs)*

Pada pertengahan abad 19, gerakan perempuan membentuk sebuah jaringan advokasi lintas negara (*Transnational Advocacy Networks*) yang bertujuan untuk menuntut hak politik bagi kaum perempuan. Seiring dengan aktifitas PBB dalam mempromosikan kesetaraan gender, sejak tahun 1970-an berkembang pula puluhan ribu organisasi perempuan di tingkat akar rumput di berbagai pelosok dunia yang saling berhubungan sehingga terbentuk jaringan nasional dan transnasional. *Transnational Advocacy Networks (TANs)* adalah jaringan aktifitas advokasi yang melibatkan aktivis dari dua negara atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau aktivis di sebuah negara yang membentuk jaringan dengan aktivis di negara lain. Jaringan aktivis berkoalisi dan beroperasi di berbagai negara ini lebih banyak berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Target *Transnational Advokasi Networks* dapat berupa kebijakan di sebuah negara atau organisasi internasional seperti PBB, IMF, *World Bank* dan sejenisnya.

Margaret Keck dan Kathryn Sikkink melihat jaringan sebagai sesuatu yang memiliki karakter komunikasi dan pertukaran yang sukarela, timbal balik, dan

horizontal (Waworuntu, Skripsi, 2012: 19). Jaringan ini bertujuan untuk merubah perilaku negara dan organisasi internasional dan muncul karena tertutupnya akses antara masyarakat sipil dan pemerintah. Tertutupnya akses ke pemerintah membuat aktivis mencari dukungan dari luar negeri. Jaringan juga muncul karena para aktivis percaya bahwa jaringan dapat menjadi jalan bagi tujuan perjuangan mereka sehingga para aktivis tersebut menggunakan jaringan. Jaringan juga dapat tumbuh apabila interaksi internasional menciptakan arena pembentukan penguatan jaringan.

Beberapa taktik yang digunakan oleh jaringan menurut Margaret dan Sikkink (*Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, 1999) antara lain: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. *Information politics* merupakan kemampuan untuk memobilisasi informasi politik; *symbolic politics* merupakan kemampuan untuk menyampaikan secara simbolik, ataupun melalui tindakan dan narasi atas situasi yang sedang dialami kepada masyarakat lain yang berada di lintas batas; *leverage politics* merupakan kemampuan untuk menarik perhatian dari aktor yang lebih kuat; *accountability politics* merupakan upaya untuk mendorong aktor yang lebih kuat dalam bertindak sesuai keijakan yang diambil (Waworuntu, Skripsi, 2012: 21).

- a. *Information politics* (politik informasi), atau kemampuan untuk memobilisasi informasi politik adalah yang diterapkan Malala dalam mengkampanyekan suara dan hak-hak perempuan kepada pemerintah dan publik dengan tujuan mendorong dan memotivasi mereka untuk

mengambil tindakan dan merubah kebijakan. *Information politics* menurut Margaret dan Sikkink dalam tulisannya, ialah:

“Information binds network members together and is essential for network effectiveness. Many information exchanges are informal – through telephone calls, email and fax communications, and the circulation of small newsletters, pamphlets and bulletins. They provide information that would not otherwise be available, from sources that might not otherwise be heard, and make it comprehensible and useful to activists and publics who may be geographically and/or socially distant.” (Margaret dan Sikkink, 1999: 95)

Jaringan mempengaruhi perkembangan komunikasi global. Oleh sebab itu, strategi media menjadi penting untuk diperhatikan oleh pergerakan masyarakat sipil, terutama dalam upaya penyampaian informasi ke publik dan komunikasi di antara masyarakat sipil. Media dapat berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi mobilisasi politik untuk isu yang diperjuangkan oleh gerakan masyarakat sipil, serta memfasilitasi pembentukan jaringan, opini publik, dan membawa isu perjuangannya melebihi batas negara. Di era globalisasi saat ini, pergerakan masyarakat sipil seringkali dikaitkan dengan peran teknologi informasi internet, yang dinilai telah membantu pergerakan masyarakat dalam hal informasi dan komunikasi lintas batas (Waworuntu, Skripsi, 2012: 21).

- b. *Symbolic politics* (politik simbolik), kemampuan anggota jaringan untuk menjadi simbolik atau menggunakan simbol-simbol maupun

tanda-tanda, aksi dan cerita-cerita tertentu yang bisa menarik perhatian pihak-pihak yang jauh.

- c. *Leverage politics* (politik mempengaruhi), kemampuan jaringan mempengaruhi dengan cara mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sehingga mampu menguatkan pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut.
- d. *Accountability politics* (politik akuntabilitas), upaya jaringan bersama para aktor yang mendukung menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berkuasa untuk dapat konsisten pada kebijakan serta prinsip-prinsip yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam kasus ini, Malala dan aktivis HAM dan pendidikan adalah sebagai pihak yang bertindak sebagai juru bicara yang membentuk jaringan gerakan advokasi. Mereka mengkampanyekan suara dan hak anak perempuan dalam pendidikan melalui media lalu menciptakan pendapat umum dan menggalang massa, dengan maksud dan tujuan agar publik memahami dan termotivasi untuk bergerak memperjuangkan hak perempuan di Pakistan baik di bidang politik, sosial maupun pendidikan.

IV. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas serta mempertimbangkan kerangka dasar teori yang digunakan, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa Malala melakukan upaya untuk memperjuangkan hak

pendidikan perempuan di Pakistan, yaitu dengan melakukan advokasi mengkampanyekan hak-hak pendidikan perempuan melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. *Information politics*, kampanye melalui media dengan menyebarkan informasi-informasi terkait hak-hak perempuan di Pakistan selama dibawah Taliban.
- b. *Symbolic politics*, menjadi simbolik perempuan di Pakistan atas perjuangan yang dilakukannya.
- c. *Leverage politics*, mengumpulkan massa dan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menguatkan gerakan yang dilakukan Malala.
- d. *Accountability politics*, upaya Malala dan aktor yang mendukung menghentikan isu-isu menyimpang terkat hak pendidikan perempuan di Pakistan.

V. Metode Penelitian

1. Metode pengumpulan data

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian
- b. Menghimpun data-data dari jurnal, artikel, surat kabar, dan browsing ke situs-situs terkait melalui internet.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut.

VI. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan perempuan di Pakistan sebelum dan setelah masuknya kaum Taliban serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Malala untuk memperjuangkannya.

VII. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu dalam penelitian skripsi ini penulis membatasi pada tahun 2007 hingga tahun 2013. Dipilihnya tahun 2007 karena pada saat itu merupakan awal mula Taliban masuk ke wilayah Barat Laut Pakistan, yaitu Lembah Swat dan semakin mengancam hak kebebasan perempuan di wilayah tersebut, terutama hak pendidikan anak-anak perempuan yang sebelumnya sudah terancam oleh sistem pemerinyahan yang ada. Dipilihnya tahun 2013 untuk dapat menjelaskan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Malala agar dapat memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan.

VIII. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang latar belakang Malala Yousafzai.

BAB III penulis akan menjelaskan tentang hak pendidikan perempuan di Pakistan sebelum dan setelah masuknya kaum Taliban.

BAB IV berisi tentang langkah-langkah Malala memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Pakistan sebelum tertembak oleh Taliban dan pasca penyembuhannya.

BAB V berisi tentang kesimpulan.